ANALISIS DINAMIKA TERHADAP IMPLEMENTASI PADA HUKUM ADMINISTRASI DI SUATU NEGARA

Asnawi¹, Siti Khaila Agisni Hermawan², Elvira Putri Agustin³, Vanesa Shelomita⁴
srgasnawi@gmail.com¹, khailahermawan5@gmail.com², putriagustinelvira@gmail.com³,
vanessashelomita1998@gmail.com⁴

Universitas Bina Bangsa

ABSTRAK

Dalam konteks modernisasi administrasi negara, penekanan pada good governance menjadi krusial untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan. Namun, implementasi hukum administrasi negara dalam mencapai good governance seringkali menghadapi berbagai tantangan kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika implementasi hukum administrasi negara dalam konteks good governance, dengan fokus pada praktik dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi praktik implementasi hukum administrasi negara yang berkontribusi terhadap good governance, serta untuk mengidentifikasi tantangan utama yang mempengaruhi pelaksanaan hukum administrasi negara tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika implementasi hukum administrasi negara sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, termasuk regulasi yang kompleks, ketersediaan sumber daya yang memadai, serta budaya organisasi yang mendukung good governance. Berdasarkan hasil analisis, terlihat bahwa upaya mewujudkan good governance melalui implementasi hukum administrasi negara membutuhkan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, dengan memperhatikan berbagai praktik terbaik dan mengatasi tantangan yang ada.

Kata Kunci: Hukum Administrasi Negara, Good Governance, Implementasi, Praktik, Tantangan.

ABSTRACT

In the context of state administrative modernization, emphasis on good governance is crucial to ensure the effectiveness and accountability of governance. However, the implementation of state administrative law in achieving good governance often faces various complex challenges. This research aims to analyze the dynamics of state administrative law implementation in the context of good governance, focusing on the practices and challenges encountered in its implementation. This study aims to explore the practices of implementing state administrative law that contribute to good governance and to identify the main challenges affecting the implementation of this state administrative law. The research results indicate that the dynamics of state administrative law implementation are greatly influenced by internal and external factors, including complex regulations, the availability of adequate resources, and organizational culture that supports good governance. Based on the analysis results, it is evident that efforts to achieve good governance through the implementation of state administrative law require a holistic and sustainable approach, taking into account various best practices and overcoming existing challenges.

Keywords: State Administrative Law, Good Governance, Implementation, Practices, Challenges.

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan kompleksitas sebuah tantangan di sektor sosial-politik yang semakin berkembang, tuntutan akan pemerintahan yang baik (good governance) menjadi semakin mendesak. Tantangan adalah suatu keadaan yang dihadapi untuk menggugah kemampuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan yang di tetapkan. (Supinah, 2022). Konsep good governance tidak hanya menjadi simbol aspirasi menuju tata kelola yang efektif dan transparan, tetapi juga menjadi landasan utama bagi terwujudnya kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah dinamika ini, hukum administrasi negara memainkan peran krusial dalam mengatur dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik, pengelolaan sumber daya negara, serta menjaga keseimbangan kepentingan masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta.

Dalam konteks Indonesia, implementasi hukum administrasi negara seringkali menjadi fokus perdebatan yang kompleks. Meskipun telah ada regulasi yang mengatur tata kelola pemerintahan, praktik-praktik yang terjadi di lapangan seringkali menunjukkan tantangan-tantangan yang memerlukan suatu pemahaman mendalam dan analisis yang komprehensif. Seiring dengan itu, upaya untuk mewujudkan good governance tidak dapat dilepaskan dari dinamika implementasi hukum administrasi negara yang terus berkembang sejalan dengan perubahan zaman, teknologi, dan tuntutan masyarakat.

Tantangan utama dalam implementasi hukum administrasi negara untuk mencapai good governance meliputi kompleksitas proses administratif, perubahan regulasi yang dinamis, kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik. Selain itu, isu-isu seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan ketimpangan akses terhadap layanan publik juga menjadi fokus penting dalam memahami dinamika implementasi hukum administrasi negara di Indonesia.

Melalui analisis yang mendalam terhadap praktik-praktik implementasi hukum administrasi negara serta tantangan-tantangan yang dihadapi, diharapkan jurnal ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman dan upaya perbaikan terhadap tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat secara menyeluruh. Dengan demikian, jurnal ini diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi dan panduan bagi para praktisi, akademisi, serta pembuat kebijakan dalam menjawab tantangan-tantangan kompleks dalam mewujudkan good governance di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, ialah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. (Peter Mahmud Marzuki, 2009)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perubahan kebijakan hukum administrasi mempengaruhi implementasinya di level praktis dan instansional

Hukum merupakan seperangkat peraturan tertulis atau tidak tertulis yang di buat oleh yang berwenang. (Wasis S.P., 2002). Kebijakan publik adalah sebuah hubungan di antara unit pemerintah dengan lingkungannya. (Anderson, 2001). Perubahan pada kebijakan hukum administrasi dan dampaknya pada implementasi di level praktis dan instansional dapat memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana sistem administrasi sebuah negara beradaptasi dengan perubahan lingkungan dalam dan luar negeri, ialah:

1. Kesesuaian dengan kondisi sosial dan ekonomi, ialah dengan adanya suatu perubahan pada suatu kebijakan hukum administrasi harus mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan politik saat ini. Kebijakan yang tidak sesuai dengan realitas pada sosial atau kebutuhan masyarakat cenderung sulit untuk diimplementasikan dengan efektif.
2. Konsistensi dan stabilitas pada hukum, ialah dengan adanya perubahan kebijakan yang terlalu sering atau tiba-tiba dapat menciptakan ketidakpastian hukum, yang dapat menghambat implementasi di tingkat praktis dan instansional. Konsistensi dalam hukum administrasi memberikan kejelasan dan memudahkan proses implementasi.
3. Kemampuan pada institusi, ialah dengan adanya perubahan kebijakan harus memperhitungkan kemampuan institusi yang akan melaksanakannya. Jika institusi

tidak memiliki sumber daya atau kapasitas yang cukup, implementasi kebijakan baru bisa menjadi tantangan yang besar.

4. Adanya partisipasi dan konsultasi, ialah adanya suatu proses pada perubahan kebijakan yang inklusif, dengan melibatkan pemangku kepentingan yang relevan, dapat meningkatkan penerimaan dan dukungan terhadap kebijakan baru. Hal ini dapat memfasilitasi implementasi yang lebih lancar di tingkat praktis dan instansional.
5. Pelatihan dan pendidikan, ialah adanya suatu kebijakan sering kali memerlukan pelatihan dan pendidikan bagi pegawai publik yang akan melaksanakannya. Investasi dalam pengembangan kapasitas ini dapat meningkatkan kemampuan administratif dan mendukung implementasi yang efektif
6. Evaluasi dan adanya pembelajaran, yang dimana ini merupakan suatu hal yang bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan yang baru untuk mengevaluasi efektivitasnya dan mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan. Proses pembelajaran ini dapat memperbaiki kebijakan di masa depan dan meningkatkan kualitas implementasi di level praktis dan instansional.

Di Indonesia, perubahan kebijakan hukum administrasi memiliki dampak yang signifikan pada implementasi di tingkat praktis dan instansional, adanya beberapa dampak sebagai berikut:

1. Penyesuaian institusi, ialah adanya perubahan kebijakan sering kali memerlukan penyesuaian dalam struktur dan proses kerja institusi pemerintah. Ini dapat melibatkan pembentukan unit baru, revisi SOP, atau pelatihan bagi pegawai untuk memahami dan melaksanakan kebijakan yang baru.
2. Adanya pengaruh terhadap praktik administrasi, ialah dengan adanya suatu perubahan kebijakan hukum administrasi dapat memengaruhi cara administrasi publik dilaksanakan sehari-hari. Misalnya, perubahan dalam prosedur pengadaan barang dan jasa dapat mempengaruhi waktu dan cara pemerintah membeli barang atau jasa.
3. Peningkatan kepatuhan dan penegakkan hukum, ialah dengan adanya suatu perubahan kebijakan sering kali dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap hukum administrasi dan memperkuat penegakan hukum. Ini dapat mencakup peningkatan sanksi terhadap pelanggar atau peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan.
4. Memiliki dampak pada sosial maupun ekonomi, ialah ada di beberapa perubahan kebijakan hukum administrasi memiliki dampak langsung pada masyarakat dan ekonomi. Misalnya, kebijakan tentang perizinan usaha dapat memengaruhi kemudahan berusaha dan investasi di suatu daerah.
5. Pemberdayaan pada masyarakat sipil. Ialah dengan adanya suatu perubahan kebijakan juga dapat mempengaruhi keterlibatan dan peran masyarakat sipil dalam proses administrasi publik. Kebijakan yang lebih terbuka dan inklusif dapat memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan terhadap pemerintah
6. Perubahan pada budaya organisasi, ialah dengan melakukan implementasi perubahan kebijakan dapat mengubah budaya organisasi dalam pemerintahan. Misalnya, jika ada penekanan pada transparansi dan akuntabilitas, ini dapat mengubah norma dan nilai-nilai yang dianut oleh pegawai pemerintah.

Analisis terhadap dampak perubahan kebijakan hukum administrasi di Indonesia memerlukan pemahaman mendalam tentang konteks politik, sosial, dan ekonomi negara tersebut serta kebijakan yang sedang diterapkan. Dengan demikian, akan lebih mudah untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan baru tersebut mempengaruhi implementasi di

level praktis dan instansional.

Interaksi antara lembaga-lembaga pemerintah, sistem peradilan, dan masyarakat sipil mempengaruhi implementasi hukum administrasi

Interaksi ialah suatu pertalian sosial antara individu sedemikian rupa sehingga yang bersangkutan saling menghargai satu sama lain. (Chaplin, James P, 2011). Interaksi antara lembaga-lembaga pemerintah, sistem peradilan, dan masyarakat sipil memiliki dampak yang signifikan pada implementasi hukum administrasi. Ada beberapa cara interaksi ini dapat mempengaruhi implementasi hukum administrasi, ialah:

1. Koordinasi antar berbagai lembaga, ialah dengan melakukan kerjasama dan koordinasi antara lembaga-lembaga pemerintah sangat penting untuk mengimplementasikan hukum administrasi dengan baik. Misalnya, lembaga legislatif dan eksekutif harus bekerja sama untuk membuat, merevisi, dan menegakkan undang-undang yang berkaitan dengan administrasi publik.
2. Peran sistem peradilan, ialah dengan memegang peran penting dalam menafsirkan dan menegakkan hukum administrasi. Putusan pengadilan dapat memberikan panduan dan preceden bagi implementasi hukum administrasi. Selain itu, proses pengadilan juga dapat menjadi mekanisme untuk menyelesaikan sengketa terkait implementasi hukum administrasi.
3. Keterlibatan pada masyarakat sipil, ialah dengan adanya partisipasi dan keterlibatan masyarakat sipil dapat mempengaruhi implementasi hukum administrasi melalui berbagai cara, seperti pemantauan kegiatan pemerintah, memberikan masukan pada pembuatan kebijakan, atau bahkan mengajukan gugatan ke pengadilan jika terjadi pelanggaran hukum administrasi.
4. Transparansi dan akuntabilitas, ialah dengan adanya dorongan dari masyarakat sipil dan putusan pengadilan dapat mendorong lembaga pemerintah untuk lebih transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas administratif mereka. Hal ini dapat meningkatkan kualitas implementasi hukum administrasi dan mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan.
5. Pendidikan hukum dan kesadaran hukum, ialah dengan adanya pendidikan hukum kepada masyarakat sipil dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang hak dan kewajiban dalam hubungannya dengan pemerintah. Dengan demikian, masyarakat sipil dapat lebih aktif dalam memastikan implementasi hukum administrasi yang adil dan berkeadilan.
6. Melakukan dialog dan konsultasi, ialah dengan melakukan interaksi antara lembaga pemerintah, sistem peradilan, dan masyarakat sipil juga dapat berupa dialog dan konsultasi yang teratur. Hal ini dapat membantu membangun pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu administratif yang kompleks dan menciptakan solusi yang lebih baik dalam menghadapinya.

Dengan demikian, interaksi antara lembaga-lembaga pemerintah, sistem peradilan, dan masyarakat sipil memiliki peran yang sangat penting dalam mempengaruhi implementasi hukum administrasi. Sinergi dan kerjasama antara ketiga entitas ini dapat meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam pelaksanaan administrasi publik. Hukum Administrasi Negara menurut Oppen Hein adalah sebagai suatu gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan yang tinggi maupun rendah jika badan itu menggunakan wewenangnya yang telah diberikan kepadanya oleh Hukum Tata Negara. (Hein, 1996)

Hukum Administrasi di Indonesia merujuk pada seperangkat aturan, prinsip, dan prosedur yang mengatur tata kelola pemerintahan, pelaksanaan kebijakan publik, dan hubungan antara pemerintah dan warga negara. Ini termasuk berbagai undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan menteri, dan instruksi-instruksi yang

menetapkan tata cara administrasi dalam berbagai bidang. Ada beberapa ciri khas dari hukum administrasi, ialah:

1. Hukum Administrasi Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip konstitusi yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, serta undang-undang lainnya yang mengatur berbagai aspek administrasi publik, seperti Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang tentang Keuangan Negara, dan lain-lain
2. Indonesia memiliki sistem hukum ganda yang terdiri dari hukum adat/tradisional dan hukum modern yang berakar pada hukum Belanda pada masa kolonial. Hukum administrasi modern juga dipengaruhi oleh prinsip-prinsip hukum administrasi dari berbagai negara, seperti Prancis, Jerman, dan Amerika Serikat.
3. Hukum Administrasi di Indonesia semakin didorong untuk menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan efisiensi dalam penyelenggaraan administrasi publik.
4. Proses hukum administrasi di Indonesia meliputi berbagai tahapan, mulai dari pembuatan kebijakan, implementasi, hingga penegakan hukum. Proses ini melibatkan berbagai lembaga pemerintah, seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta partisipasi masyarakat sipil.
5. Hukum Administrasi juga melindungi hak-hak warga negara dalam berinteraksi dengan pemerintah, termasuk hak atas layanan publik yang berkualitas, hak atas informasi, dan hak untuk mengajukan gugatan atau banding jika merasa haknya dilanggar.
6. Pengadilan Administrasi memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa administratif antara warga negara dan pemerintah. Pengadilan ini memastikan bahwa keputusan administratif diambil sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip keadilan

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dinamika terhadap implementasi hukum administrasi di suatu negara, dapat disimpulkan bahwa implementasi hukum administrasi dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang kompleks, termasuk perubahan kebijakan, interaksi antara lembaga pemerintah, sistem peradilan, dan masyarakat sipil. Perubahan kebijakan hukum administrasi memiliki dampak yang signifikan pada implementasinya di tingkat praktis dan instansional. Kebijakan yang disusun dengan baik dan didukung oleh koordinasi antarlembaga pemerintah memiliki kemungkinan lebih besar untuk diimplementasikan dengan efektif. Sistem peradilan memainkan peran penting dalam menafsirkan dan menegakkan hukum administrasi.

Putusan pengadilan dapat memberikan panduan yang penting bagi implementasi hukum administrasi dan memastikan penegakan hukum yang konsisten dan adil. Keterlibatan aktif masyarakat sipil dapat menggunakan mekanisme hukum untuk menyelesaikan sengketa. Partisipasi masyarakat sipil dapat membantu memperkuat akuntabilitas pemerintah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Implementasi hukum administrasi membutuhkan kerjasama dan koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah, sistem peradilan, dan masyarakat sipil. Sinergi antara berbagai pihak ini dapat meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam pelaksanaan administrasi publik.

Evaluasi terhadap implementasi hukum administrasi merupakan langkah penting untuk mengidentifikasi keberhasilan, tantangan, dan peluang perbaikan. Proses pembelajaran dari pengalaman implementasi sebelumnya dapat membantu meningkatkan kualitas kebijakan dan praktik administratif di masa depan. Dengan memahami dinamika yang mempengaruhi implementasi hukum administrasi, sebuah negara dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan, memperkuat perlindungan hukum bagi warga negara, dan meningkatkan kualitas

pelayanan publik secara keseluruhan.

Perubahan kebijakan hukum administrasi mempengaruhi implementasinya di level praktis dan instansional, ialah :

1. Dampak signifikan ialah dengan adanya perubahan pada kebijakan hukum administrasi memiliki dampak yang signifikan pada implementasinya di tingkat praktis dan instansional. Perubahan tersebut dapat memengaruhi prosedur, proses kerja, dan keputusan yang diambil oleh lembaga-lembaga pemerintah.
2. Adanya tantangan yang signifikan, ialah adanya implementasi perubahan kebijakan sering kali menimbulkan tantangan dalam penyesuaian di tingkat praktis dan instansional. Institusi pemerintah perlu memperbarui prosedur, kebijakan internal, dan memberikan pelatihan kepada pegawai untuk memastikan kesesuaian dengan kebijakan baru.
3. Melakukan koordinasi yang dilakukan, ialah dengan melakukan implementasi perubahan kebijakan hukum administrasi memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai lembaga pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Tanpa koordinasi yang efektif, implementasi bisa menjadi terhambat dan tidak efisien.

Interaksi yang positif antara lembaga-lembaga pemerintah, sistem peradilan, dan masyarakat sipil dapat meningkatkan implementasi hukum administrasi. Kerjasama dan sinergi antara ketiga entitas ini memungkinkan pertukaran informasi, pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu yang relevan, dan koordinasi yang lebih efektif dalam pelaksanaan kebijakan. Keterlibatan masyarakat sipil dan sistem peradilan dapat memainkan peran penting dalam pengawasan terhadap pemerintah. Hal ini dapat meningkatkan akuntabilitas institusi pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan administratif.

Masyarakat sipil dapat memantau tindakan pemerintah dan menggunakan sistem peradilan untuk menegakkan hak-hak mereka. Sistem peradilan yang independen dapat membantu memastikan penegakan hukum yang konsisten dan adil terhadap pelanggaran hukum administrasi. Putusan pengadilan yang berlandaskan hukum memberikan pedoman yang jelas bagi implementasi kebijakan administratif dan mengurangi risiko ketidakpastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, L. d. (2001). *A Taxonomy for Learning*. New york: Addison Wesley Lonman Inc.
- Chaplin, James P. (2011). *Kamus Psikologi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Hein, G. E. (1996). *Constructivist Learning Theory*.
- Peter Mahmud Marzuki. (2009). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, .
- Supinah. (2022). *Ketahanan Emosional Kemampuan Yang Harus*. Praya: Penerbit P4I.
- Wasis S.P. (2002). *Pengantar ilmu hukum*. Malang: UMM Press,.